

Daftar Isi

Balinese Women and Identities: Are They Trapped in Traditions, Globalization or Both?	
I Wayan Suyadnya	95–104
Konstruksi Identitas Perempuan dalam Majalah <i>Cosmopolitan</i>	
Eva Leiliyanti	105–120
Pemanfaatan Jamu Madura oleh Perempuan di Kabupaten Bangkalan	
Mutmainnah	121–127
Fenomena Bias Gender dalam Pemakaian Bahasa Indonesia	
Moch. Jalal	128–131
Hambatan-Hambatan Struktural-Kultural-Personal Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
Machya Astuti Dewi	132–139
Penguatan Hak-Hak Buruh Migran Melalui Pelibatan <i>Community Based Organization</i> sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura	
Devi Rahayu	140–147
Strategi Sinergi untuk Memberdayakan BUMN di Indonesia	
Diana Sulianti Kristina Lumban Tobing	148–155
Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Pasuruan Jawa Timur	
Nasikh	156–162
Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Surabaya	
Benny Soembodo	163–170
Perencanaan Paket Wisata atau Tour	
Edwin Fiatiano	171–178
Pedagang dan Revitalisasi Pasar Tradisional di Surabaya: Studi Kasus pada Pasar Wonokromo dan Pasar Tambah Rejo, Surabaya	
Martinus Legowo, FX Sri Sadewo & M. Jacky	179–187

Pedagang dan Revitalisasi Pasar Tradisional di Surabaya: Studi Kasus pada Pasar Wonokromo dan Pasar Tambah Rejo, Surabaya

Martinus Legowo, FX Sri Sadewo & M. Jacky¹

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Surabaya

ABSTRACT

This article originates from a research on traditional market traders of Pasar Wonokromo and Pasar Tambah Rejo in Surabaya. It explores the situation faced by the traditional traders in both markets when they are facing the government policy of revitalizing the traditional markets. It has found that in facing the policy of revitalizing traditional markets, the traditional traders in Pasar Wonokromo and Pasar Tambah Rejo were trapped with three major problems, namely weak political access, stress vulnerability, and lack of capital. The three major problems simultaneously led them to a weak position vis-a-vis the government. The author describes throughout the paper various factors causing the traders to be trapped in the three major problems mentioned above.

Key words: market revitalization, stress traditional trader, adaptive strategy

Di dalam situasi krisis, pekerjaan sebagai pedagang tradisional yang merupakan bagian dari sektor informal. Pfeffermann (2000: 3) menyebutkan bahwa sektor informal, termasuk pedagang tradisional, menyumbang 58% kesempatan kerja dan mampu membebaskan seseorang dari belenggu kemiskinan. Di Indonesia, catatan yang serupa juga ditunjukkan oleh Wiradi (1985: 48) bahwa ketika struktur penguasaan tanah di pedesaan tidak menguntungkan bagi kelompok miskin desa, maka bekerja di sektor *off-farm*, termasuk di perkotaan merupakan strategi adaptasi untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Oleh karenanya, pasar tradisional di kota masih tetap bertahan, meski pertumbuhannya sangat lambat. Pertumbuhan pasar tradisional yang lambat tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kota yang ingin mengurangi dan menggantikan dengan pasar modern. Ada beberapa alasan pemerintah kota mengadakan peremajaan pasar tradisional. Pertama, pasar tradisional dipandang mengganggu kebersihan dan ketertiban kota. Pasar tradisional terkesan kumuh dan kotor. Hal ini berbeda dengan pasar modern yang mudah ditata dan bersih. Kedua, dengan hanya menarik redistribusi pada setiap pedagang, pemerintah

tidak memperoleh pendapatan asli daerah yang besar. Sebaliknya, melalui penjualan, pajak dan sejumlah redistribusi, pemerintah kota memperoleh pendapatan yang tinggi. Sementara itu, akses politik pedagang tradisional yang lemah semakin menguatkan kebijakan tata ruang tersebut. Akibatnya, kebijakan peremajaan tersebut terus dijalankan, meski di lapangan harus berhadapan dengan para pedagang, seperti kasus Tanah Abang di Jakarta, kasus Pasar Wonokromo dan Pasar Tambah Rejo di Surabaya.

Meskipun demikian, sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, pemerintah kota tetap menyediakan bagi ruang bagi pedagang tradisional, seperti telah dilakukan pada pedagang Pasar Wonokromo. Namun demikian, pedagang tersebut kemudian dikenakan aturan sebagaimana pasar modern, antara lain waktu kerja yang dibatasi, selain harus membayar stan yang ditempati. Proses dari awal peremajaan hingga berdirinya pasar modern tersebut sudah barang tentu menimbulkan krisis dan stress. Penelitian ini bermaksud untuk menggali tentang akses politik, kondisi krisis dan stress pada para pedagang, sekaligus bagaimana strategi penyesuaian.

¹ Korespondensi: Martinus Legowo, FX Sri Sadewo dan M. Jacky. Prodi Sosiologi, FIS, UNESA. Gedung I 7 Kampus Unesa Jl. Ketintang Surabaya. Telp: (031) 8280009. E-mail: m_legowo@yahoo.com

Intervensi Pasar Modern dan Pedagang Tradisional: Suatu Tinjauan Pustaka

Perubahan pasar tradisional (*wet market*) ke pasar modern (seperti minimarket, supermarket bahkan hipermarket) tidak terelakan. Hasil penelitian AC Nielson menyebutkan, tingkat pertumbuhan pasar tradisional di Indonesia hanya 8,01%, sedangkan pasar modern (hipermarket) sebesar 31,4%. AC Nielson merinci, pertumbuhan supermarket dan minimarket di Jakarta sebesar 16,9%, Jawa Barat 20%, Jawa Tengah 9,4%, Jawa Timur 13,3% (Kompas, 22 Juni 2004, “Besarnya Peminat Supermarket Tantangan Pasar Tradisional”). Kebijakan peremajaan pasar tradisional dilakukan terutama pada pasar dengan kondisi darurat, antara lain akibat kebakaran, seperti Pasar Wonokromo yang terbakar tahun 1992. Sementara itu, pada pasar yang tidak menguntungkan Pemkot Surabaya berencana melakukan tukar guling dan kemudian oleh pihak swasta dijadikan sebagai pasar modern (Kompas, 4 Februari 2005, PD Pasar Merencanakan Peremajaan 22 Pasar Tradisional”). Ada asumsi lain, karena menunjukkan kesan jorok, pasar tradisional dinilai tidak sehat, dapat menjadi tempat penyebaran penyakit, seperti pada kasus SARS dan Avian Influenza di Hongkong (Webster, 2004: 234).

Max Weber (1977: 11–42) menyebutkan bahwa pasar yang dikategorikan sebagai tradisional ini tumbuh seiring dengan pertumbuhan kota. Di dalam fungsinya menghubungkan antara produsen dan konsumen, kota mengembangkan pasar tradisional. Sementara itu, keberadaan fungsi kota sebagai pusat pemerintahan dan *benteng* (keamanan) memberikan jaminan pasar untuk terhindar dari ancaman keamanan. Pendapat ini didukung oleh teori-teori tentang Pusat Pertumbuhan Kota (*Central Place Theory*) (Nas, 1984: 40; Soekadri K., 1996: 25).

Perubahan ini kemudian berlanjut dengan peremajaan pasar tradisional, menjadi pasar modern mulai dari produk hingga mekanisme distribusinya. Di dalam peremajaan pasar, terjadi proses masuknya modal besar ke pasar tradisional (kapitalisasi). Di dalam proses tersebut, pelaku-pelaku ekonomi baru masuk dengan serta-merta merubah sistem redistribusi barang, mulai dari jenis barang, hingga pola interaksi antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, ada pendapat bahwa membanjirnya pasar modern akan

mematikan pasar tradisional dan membangkrutkan pedagang tradisional. Mereka khawatir, dalam lima tahun mendatang pasar tradisional digeser supermarket dan hipermarket. Natawidjaja (2005) menyebutkan bahwa pertumbuhan pasar modern 85% per tahun antara tahun 1983 dan 1987, menurun menjadi 12% antara tahun 1993 dan 1997. Dari 2000 hingga 2004, pasar modern mengambil porsi penjualan 1–3% dari pasar tradisional. Kondisi ini sama seperti di China, berdasarkan riset AC Nielsen, sebanyak 49%, konsumen berbelanja di hipermarket, dan 43% di supermarket (Kompas, 22 Juni 2004, “Besarnya Peminat Supermarket Tantangan Pasar Tradisional”). Akibatnya, seperti dikatakan oleh Kustarjono Projolalito, daya beli masyarakat menjadi turun, kemudian banyak toko-toko kecil tutup karena kehilangan pasar (Kompas, 29 Januari 2003, “Hipermarket Ancam Peritel Kecil”). Meskipun demikian, ada pendapat lain bahwa pembangunan pasar modern tidak mengganggu pasar tradisional karena memiliki segmen berbeda.² Selain itu, Munoz (2001) menyatakan bahwa pada kondisi tertentu pasar tradisional juga bisa berkembang secara berkelanjutan (*sustainable market*).

Ramlan Surbakti (1996: 20–21) mencermati perubahan tata ruang kota, termasuk peremajaan pasar, dan pada akhirnya menyebabkan masalah sosial perkotaan ini sebagai interelasi antara pola distribusi ruang, proses sosial dan distribusi kekuasaan. Kedudukan ruang tidak lagi diperlakukan sebagai variabel independen, tetapi variabel dependen dan antara. Perebutan ruang dengan konflik atas tanah ini terjadi tidak saja karena ruang yang sempit diperebutkan banyak orang, tetapi juga karena pola distribusi ruang, proses sosial, dan pola distribusi penggunaan kekuasaan. Perebutan ini diawali dari pola konflik tanah yang melibatkan pemerintah daerah dengan ideologi yang mendasari dan membenarkan tindakan.

Di perkotaan, kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat tidak hanya untuk kalangan swasta, tetapi juga untuk penduduk dan pemerintah, sementara tanah yang tersedia makin sempit. Tanah kemudian berubah menjadi komoditi, baik sebagai investasi maupun untuk tujuan produktif, sehingga harga tanah tidak terkendali. Dalam situasi ini, mereka yang buta hukum dan tidak memiliki informasi ekonomi pasti berada dalam posisi lemah

² Salah satu kelemahan pasar tradisional adalah kondisi fisik yang rusak, kotor, kumuh, gelap, dan rawan pencopet. Lihat Kompas, “Pasar Tradisional Memprihatinkan, Masyarakat Lebih Memilih Belanja di Pasar Swalayan”, 31 Mei 2002; Kompas, “Pungli Merajalela di Pasar Tradisional”, 22 Juni 2001.

dalam transaksi ekonomi. Sebaliknya, pemda dinilai gagal memberikan perlindungan karena mengadopsi cara berpikir dan aspirasi kalangan dunia usaha swasta dan mengabaikan cara berpikir dan aspirasi penduduk biasa yang lebih menekankan persamaan dan keadilan (Surbakti, 1996: 29).

Hal ini dirasakan oleh warga Surabaya. Bagong Suyanto (1996: 49) menunjukkan bahwa dengan dalih demi kepentingan pembangunan nasional, birokrasi (pemkot) sebagai kekuatan kelembagaan yang harus membela rakyat, justru sering tidak bertindak sebagai mediator yang adil dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah antara rakyat dengan kekuatan komersial. Banyak aparat birokrasi justru *kongkalikong* dengan para pengusaha untuk menekan rakyat. Keinginan untuk mengejar pertumbuhan menyebabkan kekuatan kelembagaan dalam banyak hal memberi kesempatan kepada kekuatan komersial untuk memanfaatkan lahan kota daripada warga kota sebagai kekuatan massa.

Metode Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk mengungkap dan memahami dampak perubahan pasar (dari tradisional ke modern) bagi pedagang tradisional. Untuk menciptakan pembangunan pasar yang seimbang disadari tidak semudah membangun gedung pencakar langit. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kota yang seimbang membutuhkan analisis dampak sosial. Sesuatu yang menunjukkan adanya proses perubahan yang harus diungkap dan dipahami. Dengan kata lain, sebagai fenomena sosial yang bersifat kompleks, sudah barang tentu disadari bahwa eksistensi dari perubahan sistem pasar tidaklah selalu menguntungkan bagi semua orang, juga merugikan bagi kalangan tertentu. Mengungkap dan memahami fenomena sosial yang kompleks memerlukan pendekatan metodologis yang mendalam dan cermat. Dengan pertimbangan semacam itu, penelitian ini mencoba untuk mengungkap dan memahami permasalahan-permasalahan tersebut dari perspektif subyek penelitian. Subyek adalah orang yang paling memahami dirinya (Denzin dan Lincoln, 1990). Oleh karena itu, subyeknya adalah pedagang tradisional Pasar Wonokromo dan Pasar Tambak Rejo, petugas penggadaan dan petugas BRI (Bank Rakyat Indonesia).

Ada tiga teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara mendalam dan data sekunder. Artinya, dimulai dari mengamati pola kehidupan (berdagang), melakukan wawancara mendalam dengan membangun *rapport* terlebih dahulu, dan

mencari data sekunder. Dari penggunaan teknik ini, penelitian ini melakukan analisis *grounded theory*.

Temuan dan Analisis Data

Anatomi Pasar Wonokromo dan Pasar Tambak Rejo

Sesuai dengan data umum dari PD Pasar Surya, kawasan pasar Wonokromo terletak di daerah Surabaya Selatan yaitu di Kelurahan Wonokromo, Luas dari daerah segitiga Wonokromo sekitar 2,5 Ha yang terbagi menjadi tiga bagian dengan luas masing-masing: luas bangunan induk: 9.000 m², luas bangunan di luar bangunan induk: 1.200 m², luas tempat berjualan di pelataran: 600 m². Pasar Wonokromo dibangun kali pertama tahun 1955 dengan luas 9000 m² dengan arsitek Subiono, yang bekerja sebagai tenaga Pemda KMS. Bangunan pasar ini khas *Indies* pantai (lihat Joko Soekiman, 2000; Hadinoto, 2000). Arsiteknya seorang tamatan STM waktu itu. Karena kekhasan bangunan dan pembiayaan dari pemerintah lokal, maka tahun 1955 Presiden Soekarno meresmikan pasar legendaris ini.

Pasar Wonokromo pun menjadi kebanggaan warga dan Pemda Surabaya. Apalagi setelah penambahan bangunan lantai 2 tahun 1959 dan pembangunan terminal bis kota "Joyoboyo", stasiun KA uap "Wonokromo" dan Kebun binatang, yang menambah semakin ramai dan terkenalnya pasar tersebut sampai ke mancanegara. Pasar Wonokromo kala itu dianggap sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara. Tidak hanya orang Surabaya, orang luar Surabaya pun menganggap bahwa pasar ini sebagai pusat perdagangan yang mampu melayani kawasan kota bahkan sampai wilayah Jawa Timur.

Pasar Wonokromo masa suram tatkala dilanda kebakaran beruntun. Pertama, tahun 1959, waktu itu lantai 2 Pasar Wonokromo dibangun. Kebakaran terjadi di bagian Selatan pasar dekat masjid dan hanya menghancurkan sebagian kios, sehingga kerugian tidak begitu besar. Kedua, tahun 1970, kebakaran yang menghancurkan hampir sepertiga bagian pasar dengan kerugian mencapai 900 juta rupiah. Ketiga, tahun 1985, terjadi hanya berupa kebakaran kecil yaitu menghancurkan bagian toko emas di sebelah Timur bangunan induk pasar. Keempat, tahun 1989, yang melanda kios-kios di lantai atas bagian Selatan dan hanya menimbulkan kerugian kecil saja. Kelima, tahun 1992 yang dinilai cukup menyebabkan kerugian yang sangat besar mencapai total sebesar 8,2 miliar rupiah yang menghancurkan hampir 80%

bangunan kompleks pasar dengan perincian 760 kios/stan bagian bawah dan 20 kios/stan di lantai atas ludes terbakar. Sedikitnya 2.400 pedagang kehilangan tempat berjualan. Sejak saat itu, pasar ini berstatus menjadi pasar darurat. Terakhir, selama tahun 2002, Pasar Wonokromo telah mengalami kebakaran sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Februari 2002, 19 Mei 2002 tapi hanya menghancurkan lima kios di pasar seluas sekitar 5.537 meter persegi itu dan terakhir pada 26 Mei 2002 menghancurkan sekitar 3.000 kios di Pasar Wonokromo.

Pasar Wonokromo, setelah terbakar tahun 2002, total luas tempat berjualan sekitar 4.670 m² dengan jumlah kios/*stand* sekitar 1.945 buah dan menampung sekitar 2.176 pedagang. Dari 1945 jumlah kios/*stand* dapat diperinci sebagai berikut: pertama, tempat berjualan di dalam bangunan induk pasar yang terdiri dari lantai atas (tidak berfungsi sama sekali) dan lantai bawah dengan jumlah toko/*stand* dan los/bedak adalah 420 buah. Kedua, tempat berjualan di luar bangunan induk pasar, jumlah toko/*stand* dan los/bedak adalah 1.780 buah. Ketiga, pelataran, yaitu tempat berjualan para pedagang di pelataran dalam areal pasar sejauh 100 m.

Ada anggapan bahwa penyebab kebakaran yang terjadi di Pasar Wonokromo adalah akibat arus pendek (*konsleting*) di salah satu kios/*stand* yang ada. Untuk tahun 2002 diduga karena terbakarnya kompor yang ada disalah satu *stand*. Meskipun telah terjadi kebakaran berulang-ulang bangunan pasar Wonokromo tetap merupakan bangunan asli sejak dulu didirikan.

Pada tahun yang sama, Pasar Tambah Rejo terbakar. Kebakaran terjadi pada pukul 15.00 WIB tanggal 27 Agustus 2002. Kebakaran menyebabkan ratusan *stand* di lantai dasar hingga dua habis terbakar. Hingga berita diturunkan, belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya saja, kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran diperkirakan berasal dari salah satu *stand* di lantai dua sebelah timur pertokoan. Dalam waktu tak terlalu lama api sudah merambah kerusakan *stand* di lantai dasar. Menurut keterangan saksi, api diduga berasal dari kompos gas karena sempat terjadi ledakan sebelum kebakaran terjadi. Melihat api berkobar dari lantai atas, pemilik *stand* di lantai satu sibuk menyelamatkan barang dagangannya, tapi hanya sebagian yang berhasil diselamatkan. Sementara pemilik yang ada dilantai dua sibuk menyelamatkan diri masing-masing (Tempo Interaktif, 27 Agustus 2002).

Selain itu, untuk revitalisasi Pasar Tambah Rejo, PD Pasar telah mengikat kontrak kerja sama dengan

investor PT Gitanusa Sarana Niaga (GSN). Sesuai konsep semula, Pasar Tambah Rejo disulap menjadi bangunan modern berlantai enam. Tak tanggung-tanggung, nilai investasinya sebesar Rp400 miliar, atau hampir dua kali lipat dari biaya pembangunan DTC (eks Pasar Wonokromo). Rencananya, lantai satu dan setengah lantai dua akan ditempati pedagang tradisional, sedangkan setengah lantai dua hingga lantai enam dibagi menjadi tiga blok. Blok pertama dipergunakan untuk mall, blok kedua untuk *trade center*, dan blok ketiga untuk lahan parkir. Lahan parkir dibangun melingkar dan dirancang mampu menampung sekitar 1.460 mobil dan 600 sepeda motor. Pasar Tambah Rejo yang bernama Kapas Krampung *Trade Center* ini juga bakal menampung sekitar 1.700 pedagang kaki lima (PKL) lebih karena jumlah *stand* adalah 2500 *stand* di Mall dan 1700 stan di Trade Center. Ukuran *stand* pedagang tradisional bervariasi namun tetap mengacu pada stan pasar lama mulai 2 × 2 meter dan luas *stand* pedagang baru cukup fleksibel. Dana investasi Pembangunan Pasar Tambah Rejo yang berlokasi di Jalan Kapas Krampung ini sekitar Rp460 miliar sampai Rp475 miliar. Dana ini akan dibebankan seluruhnya kepada investor yang ditunjuk dan PD Pasar Surya tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun. (Pemkot Surabaya, 2004).

Kurang lebih sama dengan pedagang Pasar Wonokromo, pedagang di pasar Tambah Rejo (TR) diklasifikasikan menjadi pedagang: pedagang besar (agen), pedagang sedang (pedagang eceran), dan pedagang kecil (pedagang eceran). Tingkat penghasilan yang diperoleh pedagang besar ini antara 3 sampai dengan 4 juta/bulan. Hal tersebut merupakan laba bersih lalu diberikan ke beberapa pegawainya sekitar 400 hingga 500 ribu per orang sebagai gaji mereka umumnya. 1 grosir atau agen umumnya memiliki 3 hingga 4 orang pegawai hal itu tergantung besar kecilnya agen tersebut. Pedagang sedang berciri yang mendapat barang dari agen/grosir ini berpenghasilan Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00 per bulan. Sementara itu, pedagang kecil berpenghasilan Rp200.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 bulan dan hal itu belum termasuk biaya angkutan/transportasi yang digunakan untuk distribusi barang tersebut.

Perbandingan Akses Politik dan Strategi Adaptif Antara Pedagang Wonokromo dan Tambah Rejo

Akses politik pedagang tradisional baik di Pasar Wonokromo dan Pasar Tambah Rejo minim. Mereka

memiliki organisasi seperti Himpunan Pedagang Pasar (HPP), Kumpulan Pedagang Pasar (KPP) tetapi daya tawar atau negosiasi dengan pemerintah dan pengembang termasuk PD Pasar Surya amat lemah, bahkan ada upaya dari pemerintah dan investor untuk memandulkan dengan menciptakan konflik internal di organisasi pedagang. Perubahan dari HPP menjadi KPP adalah bukti ikut campurnya pemerintah dalam membonsai organisasi pedagang tradisional. Studi ini menemukan akses politik yang berbeda antara di pasar Wonokromo dengan Pasar Tambah Rejo. HPP di Pasar Wonokromo lebih memiliki akses daripada di Tambah Rejo. Walau ada HPP di Tambah Rejo, tetapi daya tawarnya sangat lemah. Sebagian besar pedagang juga tidak terintegrasi ke dalam HPP.

Selain menghadapi persoalan internal, yakni HPP yang tak bisa bekerja secara maksimal, secara eksternal institusi politik baik eksekutif dan legislatif tidak berpihak pada pedagang tradisional, bahkan lebih berpihak pada pembangunan pasar modern. Keperpihakan semacam itu tanpa ada kebijakan yang melindungi pedagang tradisional pada akhirnya membuat pedagang ini tersisih dari peremajaan pasar tersebut. Pemerintah kota Surabaya lebih mementingkan pengusaha, investor, *developer* dengan membangun pasar modern ketimbang pasar tradisional.

Di mata Pemkot, pasar tradisional dianggap mengindap kelainan (*otherness*). Pertama, mengganggu kebersihan dan ketertiban kota. Pasar tradisional dikesankan memiliki infrastruktur yang jelek, kondisi fisik yang rusak, jorok, kumuh, kotor, berbau busuk, susah diatur, liar, tidak sehat, dapat

menjadi tempat penyebaran penyakit dan rawan pencopet serta mudah terbakar. Hal ini berbeda dengan pasar modern yang mudah ditata dan bersih seperti Tunjungan Plasa, Surabaya Plasa, Galaxy Mal, dan DTC.

Kedua, dengan hanya menarik redistribusi pada setiap pedagang, di pasar tradisional pemerintah tidak memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang besar. Sebaliknya, melalui penjualan stan, pajak dan sejumlah redistribusi, Pemkot memperoleh pendapatan yang tinggi di pasar modern seperti DTC, Jembatan Merah Plasa, Royal Plasa, City of Tomorrow, Giant Hypermarket, Carrefour, Plasa Marina, World Trade Center (WTC), THR dan seterusnya.

Di lain pihak, akses politik pedagang tradisional yang lemah semakin memuluskan kebijakan plasanisasi. Meski di lapangan Pemkot harus berhadapan dengan para pedagang tradisional, seperti kasus Pasar Wonokromo dan Pasar Tambah Rejo. Sejauh ini pedagang hanya ditopang Himpunan Pedagang Pasar (HPP). Tidak semua pedagang tergabung dalam organisasi itu. Mereka yang tak masuk ke dalam organisasi rentan dipermainkan oleh PD Pasar, preman dan investor.

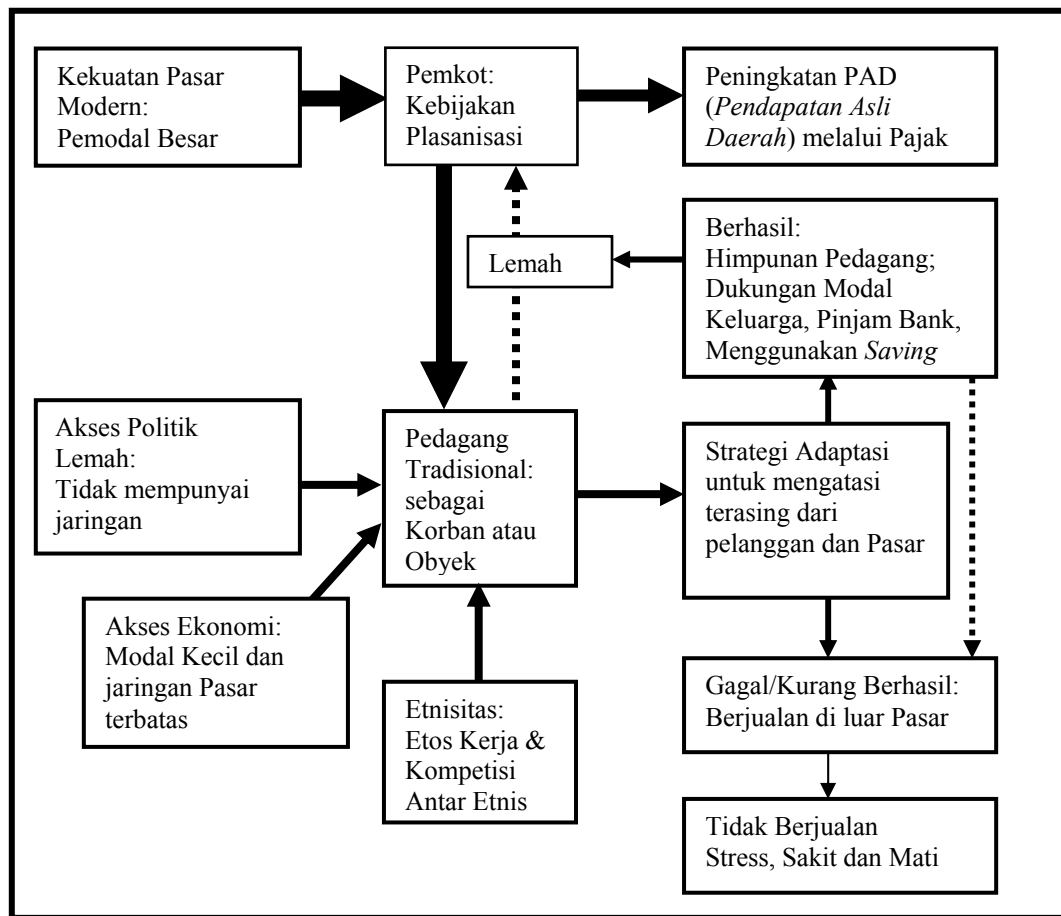
Melalui organisasi itu, pedagang tradisional itu memiliki ruang untuk melakukan perlawanan atau setidaknya menyalurkan aspirasi politik mereka. Pedagang yang terintegrasi di organisasi, lebih kritis ketimbang yang tidak tergabung. Mereka aktif melakukan aksi turun jalan (demonstrasi), bahkan pembangkangan sipil dengan menolak membayar uang stan. Hal itu terjadi di Pasar Wonokromo. Sementara itu, pedagang yang tidak

Tabel 1.
Perbandingan Akses Politik, Stress dan Strategi Adaptif Pedagang Wonokromo dan Tambah Rejo

	Wonokromo	Tambah Rejo
"Lembaga Politik Lokal"	Himpunan Pedagang relatif berfungsi	Himpunan Pedagang lemah
Etnisitas	Terjadi Kompetisi antar Etnis Laten Etnis Madura membangun jaringan dengan PD Pasar untuk memperoleh stan strategis	Terjadi Kompetisi antar Etnis Manifest. Dominasi Etnis Madura tidak menguntungkan pedagang keseluruhan.
Akses Politik (Kemampuan Tawar)	Perbedaan Etos Kerja antar Etnis Sedang, Menuju Rendah	Perbedaan Etos Kerja antar Etnis Rendah
Akses Modal	Lemah Meminjam pada kerabat dan/ atau Bank Menggunakan <i>Saving</i>	Lemah Meminjam pada kerabat dan/ atau Bank Menggunakan <i>Saving</i>
Stress	Tinggi	Tinggi
Strategi Adaptasi	Bervariasi, tergantung akses modal, akses politik dan etos kerja Varian: Gagal/Kurang Berhasil Berhasil	Bervariasi, tergantung akses modal, akses politik dan etos kerja Varian: Gagal/Kurang Berhasil Berhasil

Sumber: Legowo, Sadewo dan Jacky, 2007: 70

Bagan 1.
Analisis tentang Akses Politik, Krisis, dan Strategi Adaptif



tergabung dalam organisasi lebih pasrah, tidak ikut demonstrasi dan kalau tidak bisa membayar *stand* memilih gulung tikar atau ganti profesi.

Stres terjadi karena ketidakmampuan akses politik kemudian diikuti dengan relokasi ke pasar darurat, mencari tempat berdagang baru, atau memilih pindah ke pasar permanen (pasar modern) dengan regulasi baru. Namun demikian, hal itu bergantung pada kemampuan beradaptasi. Secara antropologis, kemampuan adaptasi ini bergantung pada jaringan yang dimilikinya. Di dalam catatan Clifford Geertz (1963), pedagang pribumi di Mojokuto memiliki jaringan kekerabatan, sosial dan keagamaan yang turut menunjang usahanya, demikian pula di Negara, Bali, pedagang didominasi dari kalangan bangsawan yang memiliki akses politik dan ekonomi. Sementara itu, penelitian Lance Castles (1982) juga menunjukkan bahwa jaringan kekerabatan dan sosial-keagamaan turut membantu dalam permodalan. Hal ini nampak juga pada pedagang tradisional di Pasar Wonokromo dan Tambak Rejo, Surabaya.

Namun demikian, plasanisasi itu membuat pedagang tradisional mengalami krisis, stres, dan

sebagian gulung tikar. Mereka dikenakan aturan baru sebagaimana di pasar modern, antara lain: waktu kerja yang dibatasi, harus membayar stan yang mahal, membayar iuran kebersihan, listrik, keamanan dan pungutan liar lainnya. Yang membuat mereka semakin tertekan adalah mereka kehilangan pelanggan setia. Dalam kasus Pasar Wonokromo, posisi stan di lantai bawah dan rata-rata pedagang tradisional mendapat stan di belakang membuat mereka tidak dilirik pembeli. Pedagang tradisional beberapa yang bangkrut, menjual mobil, rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penghasilan mereka tidak mencukupi untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga terpaksa putus sekolah. Sebagian lagi memboyong anak-anaknya kembali ke desa. Banyak juga yang jatuh sakit, mengalami serangan jantung dan *stroke*.

Pedagang tradisional di Pasar Wonokromo dan Pasar Tambak Rejo mengalami proses alienasi. Mereka terasing dari pasar, terasing dari pelanggan, terasing dari barang dagangannya dan terasing dari lingkungan. Pasar baru membuat mereka mengalami kesulitan beradaptasi. Walau secara fisik pasar itu

mewah, tetapi struktur bangunannya membuat mereka terasing dari kebiasaan lama. Pasar itu merasa membatasi gerak dan kebiasaan (*habitus*) pedagang tradisional. Di pasar tradisional pedagang bisa menimbun barang dagangan atau menjadikan *stand* menjadi gudang, tetapi di pasar modern stok barang dibatasi. Mereka juga dilarang memasak. Selain itu, pedagang mengalami keterasingan *stand*. Pasar baru memunculkan persoalan pelik berupa penentuan tempat/lantai bagi pedagang dan posisi *stand*. Penentuan *stand* diwarnai dengan jual beli, walau isunya diundi. Bagi pedagang bermodal tinggi membeli *stand* yang strategis di dekat pintu masuk, sementara pedagang “gurem” pasrah mendapatkan *stand* di belakang.

Keterasingan dari pelanggan menjadi “hantu” terbesar pedagang tradisional. Hantu itu di depan mata dan dihadapi pedagang tradisional. Selepas pasar tradisional itu terbakar, pedagang tradisional mengalami kehilangan kontak dengan pelanggan. Pedagang tradisional Pasar Tambah Rejo kehilangan pelanggan di pasar sementara Bronggalan. Setelah mendapat sedikit pelanggan di pasar sementara harus kehilangan pelanggan lagi setelah mereka kembali ke Pasar Tambah Rejo. Setahun mereka di Pasar Tambah Rejo baru, *recovery* pelanggan juga belum terjadi.

Pedagang tradisional Pasar Wonokromo kehilangan pelanggan di tempat penampungan sementara di Ketintang dan Manggadua. Di tempat pasar sementara (TPS), mereka kehilangan pelanggan dan penurunan pendapatan. Penantian yang panjang ini akan membuat pedagang tradisional kekurangan sandang, pangan dan kesulitan membayarkan uang pendidikan anaknya. Anak-anak pedagang tradisional rawan putus sekolah. Persis yang dialami pedagang tradisional Wonokromo saat di pasar sementara, di tempat sekarang dibangun Royal Plaza.

Upaya dari pedagang tradisional untuk menarik pembeli dengan menambah, bahkan mengganti barang dagangan. Di pasar tradisional, pedagang menjual buah pisang di pasar modern barang dagangan diganti menjadi menjual bumbu dapur. Atau sebaliknya, awalnya berjualan bumbu dapur menjadi berjualan pisang. Pergantian barang dagangan ini membuat pedagang mengalami kebingungan, tapi tidak penuh karena alasan menjangkau pembeli, beberapa pedagang terpaksa mengganti barang dagangan. Mereka lebih beralih barang yang tidak mudah busuk, seperti alat-alat dapur, bumbu masak yang kering, perlengkapan alat rumah tangga. Hal itu menghapus pola spesialisasi berdagang. Mayoritas pedagang tradisional menjual hal yang

sama. Hal itu membuat persaingan antar pedagang tradisional semakin berat.

Pedagang tradisional di pasar tradisional umumnya ditandai dengan hubungan sosial yang dekat, personal dan saling mengenal. Ketika pasar modern dibangun, hubungan sosial itu mulai tergerus. Antara pedagang yang satu dan yang lainnya sudah tidak saling mengenal. Pedagang tradisional sudah sulit menyebut nama di stan sebelahnya. Terjadi perubahan solidaritas sosial dari solidaritas mekanis ke solidaritas organis. Fenomena yang timbul adalah antara pedagang tidak terjalin kepedulian. Di pasar tradisional jarang terjadi pencurian karena mereka saling kenal dan saling membantu mengawasi barang, di pasar modern ini pedagang kerap kali kehilangan barang dagangan. Di pasar modern, pedagang tradisional kehilangan “pengawasan melekat” (*panoptikon*), sehingga memudahkan pencuri bereaksi.

Soal modal sebenarnya tidak masalah bagi sebagai pedagang tradisional. Sebagian pinjam ke bank, koperasi, penggadaian bahkan ada yang memanfaatkan jaringan keluarga karena takut bunga bank yang tinggi dan persyaratan berupa sertifikat. Beberapa pedagang tradisional di Tambah Rejo bahkan ada yang secara langsung ditawari oleh bank untuk pinjam uang. Tetapi mereka takut karena ada beberapa kasus bank melakukan penyegelan terhadap stan. Di Pasar Tambah Rejo terdapat 10 stan yang disegel karena pedagang tradisional tak mampu membayar cicilan bulanan.

Yang membuat mereka susah adalah hilangnya pelanggan. Memang ada sebagian kecil pedagang yang masih memiliki pelanggan tetap, sebagian besar sudah tak punya pelanggan. Dalam kasus Pasar Wonokromo, pembeli lebih memilih belanja ke mal di atas kios pedagang tradisional. Infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan yang sempit, penuh sesak barang dagangan membuat pembeli tidak nyaman. Sementara di Pasar Tambah Rejo, pedagang tradisional menghadapi problem yang berbeda. Yang membuat sepi pembeli bukan mal di lantai atas karena belum buka justru pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang tradisional di luar Pasar Tambah Rejo. Di Pasar Wonokromo, karena permintaan HPP, PKL di luar pasar ditertibkan sebagian di pindah ke Mangga Dua, sementara di Pasar Tambah Rejo, PD Surya termasuk Pemkot Surabaya belum berani menertibkan PKL.

Di pasar yang baru Wonokromo, pedagang menghadapi masalah modal dan penurunan pendapatan. *Stand* yang mahal dan hilangnya pelanggan karena munculnya pelaku yang lebih

besar membuat pedagang tradisional rentan gulung tikar. Sebagian terjebak ke dalam rentenir, tidak bisa membayar di bank, koperasi, penggadaian dan berakhir tergadainya barang, perhiasan dan disegelnya *stand*. Lembaga-lembaga semacam itu biasanya yang meraup untung, sementara pedagang merana.

Satu hal yang menarik terjadi di Pasar Tambah Rejo, pedagang melakukan strategi adaptif berupa strategi “pembangkangan” dan “lompat katak”. Mereka tetap mengambil *stand* yang disediakan oleh pengembang PD Pasar Surya. Tak hanya pedagang tradisional di dalam pasar, mereka yang selama ini berjualan di luar pasar juga mengambil *stand-stand* yang tersedia. Pedagang tradisional melakukan pembangkangan sipil berupa menolak pembayaran *stand*. Penolakan pembayaran stan secara kolektif di Pasar Tambah Rejo ini membuat PD Pasar Surya tidak bisa berbuat banyak dalam arti tidak bisa memaksa atau menyegel *stand*. Apalagi pedagang tradisional di Tambah Rejo memberikan tuntutan bahwa akan membayar *stand* bila PD Pasar Surya mampu menertibkan PKL dan pedagang tradisional di luar Pasar Tambah Rejo baru.

Kondisi pasar yang masih sepi, beberapa pedagang tradisional melakukan strategi adaptif berupa berjualan di luar pasar baru Tambah Rejo. Sebagian pedagang tetap berjualan di bekas pasar sementara, Bronggalan agar tidak kehilangan pelanggan. Sebagian lagi berjualan di sekitar pasar baru Tambah Rejo. Mereka ini dikenal dengan istilah “pedagang PKL”. Sebagian lagi tersebar ke dalam pasar-pasar krempyeng atau pasar senggol untuk memulihkan pendapatan.

Pembeli enggan belanja ke pedagang tradisional di pasar modern Tambah Rejo. Mereka lebih suka belanja di pasar senggol, pasar dadakan yang berada di sekitar mal Tambah Rejo. Sebagian kios yang tutup dan ditinggalkan pedagang. Sebagian pedagang tradisional masih menetap di TPS Bronggalan karena dianggap lebih baik ketimbang di mal Tambah Rejo, bahkan sebagian pedagang menjadi PKL, dan berjualan di luar mal atau di jalan. Transaksi jual beli justru lebih besar di luar mal ketimbang di dalam mal.

Pedagang tradisional menjadi orang asing di pasarnya sendiri. Mereka tampaknya belum mau menerima perubahan yang tak berakar tersebut. Jika di pasar yang dulu ia bisa berjualan 24 jam sekarang diberi waktu pukul 01.00–21.00. Pedagang pun mengeluarkan uang yang lebih besar untuk konsumsi dan kebutuhan yang lain selama di pasar. Mereka dilarang menyalakan kompor sehingga harus

membeli makan dan minuman (kopi dan teh). 3 kali makan, 2 kali kopi dan 3 kali teh panas sudah banyak mengeluarkan uang banyak. Mereka juga dikenakan biaya mandi, buang air kecil dan buang air besar. Uang Rp10.000,00 habis untuk 2 kali mandi, 2 kali buang air besar dan 6 kali buang air kecil. Memang itu, aspek mikro tetapi berdampak bagi pedagang tradisional yang subsisten.

Penutup

Dapat disimpulkan, pedagang tradisional Pasar Wonokromo dan Tambah Rejo menghadapi tiga masalah besar saat terjadi peremajaan pasar dari pasar tradisional ke pasar modern. Besaran masalah tersebut terletak pada tiga dimensi pokok yakni akses politik yang lemah, rentan stres dan kesulitan modal. Dari dua kasus pasar antara Pasar Wonokromo dan Tambah Rejo memang terjadi persamaan dan beberapa perbedaan soal besaran masalah tersebut.

Secara umum pedagang tradisional baik di Pasar Wonokromo dan Tambah Rejo memiliki akses politik yang minimalis. Di kedua pasar tersebut, pedagang tradisional hanya ditopang satu organisasi berupa Himpunan Pedagang Pasar (HPP) atau Kumpulan Pedagang Pasar (KPP). Akibatnya daya tawar pedagang tradisional amat lemah ketika berhadapan dengan kepentingan Pemerintah Kota Surabaya, pengembang dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Pemkot dan Pemprop Jatim lebih memihak pada pengembang dan pedagang besar (pemain besar). Pemkot dan Pemprop sendiri lebih memilih pasar modern ketimbang pasar tradisional. Kedua pemerintah daerah tersebut menjadi pasar modern sebagai ikon pembangunan atau indikator pembangunan.

Tak hanya Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim yang mengabaikan eksistensi pedagang tradisional, lembaga legislatif seperti DPRD Surabaya dan DPRD Jatim pun turut serta dalam meminggirkan pedagang tradisional. Mereka dibiarkan sendiri berjuang dalam menghadapi ideologi kapitalistik di balik proyek pasar modern.

Walau begitu organisasi pedagang tradisional itu masih bisa melakukan perlawanan. Dibandingkan dengan Pasar Tambah Rejo, organisasi pedagang di Pasar Wonokromo lebih aktif. Posisi tawar pedagang tradisional Wonokromo pun lebih kuat ketimbang pedagang tradisional di Pasar Tambah Rejo. Tuntutan penertiban PKL yang diminta pedagang tradisional Tambah Rejo tidak ditanggapi serius oleh PD Pasar Surya. Padahal, pembeli yang sepi di Pasar Tambah

Rejo baru karena PKL dan pedagang tradisional yang berjualan di luar Pasar, di Jalan Tambah Rejo.

Mayoritas pedagang mengalami kondisi stres karena mahalnya *stand*/kios, iuran sampah, listrik, keamanan. Kehilangan pelanggan membuat mereka lebih tertekan. Pasca kebakaran dan lama berjualan di penampungan serta pembangunan pasar yang memakan waktu lama, membuat pelanggan beralih ke tempat, pasar dan pedagang lainnya. Pedagang tradisional di Pasar Wonokromo juga mengeluhkan posisi *stand* di lantai bawah dan rata-rata pedagang tradisional di pasar lama mendapat stan di belakang membuat mereka tidak dilirik pembeli. *Stand* strategis justru dikuasai pedagang baru. Mereka mengalami kebangkrutan, menjual mobil, rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penghasilan mereka tidak mencukupi untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga terpaksa putus sekolah. Sebagian lagi memboyong anak-anaknya kembali ke desa, ada pula yang jatuh sakit, terkena serangan jantung dan *stroke*.

Soal modal sebenarnya tidak masalah. Sebagian pinjam ke bank, koperasi, penggadaian bahkan ada yang memanfaatkan jaringan keluarga karena takut bunga bank yang tinggi dan persyaratan berupa sertifikat. Pedagang tradisional umumnya takut meminjam uang di bank karena dalam banyak kasus stan di segel oleh bank. Pedagang tradisional rata-rata kesulitan membayar uang cicilan bulanan karena sepihnya pembeli, hilangnya pelanggan. Memang ada sebagian kecil pedagang yang masih memiliki pelanggan tetap, sebagian besar sudah tak punya pelanggan. Di Pasar Wonokromo pembeli lebih memilih belanja ke mal di atas kios pedagang tradisional. Sementara di Pasar Tambah Rejo, pembeli beralih ke PKL dan pedagang tradisional di luar Pasar Tambah Rejo yang baru.

Daftar Pustaka

- Castles, L. (1982) *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa. Industri Rokok Kudus*. Diterjemahkan oleh J. Sirait. Jakarta: Sinar Harapan.
- Denzin, N & Lincoln, Y. (1990) *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research, Hand Book of Qualitative Research*. London and New York.
- Geertz, C. (1963) *Peddlers and Princes. Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Kompas. (2001) "Pungli Merajalela di Pasar Tradisional." 22 Juni. Hal. 20. Kol. 1-5.

- Kompas. (2002) "Pasar Tradisional Memprihatinkan, Masyarakat Lebih Memilih Belanja di Pasar Swalayan." 31 Mei. Hal. 31. Ko. 1-5.
- Kompas. (2003) "Hipermarket Ancam Peritel Kecil" 29 Januari. Diakses dari <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0301/29/ekonomi/102362.htm>. tanggal 25 Agustus 2007.
- Kompas. (2004) "Besarnya Peminat Supermarket Tantangan Pasar Tradisional" 24 Juni. Diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/22/ekonomi/1098320.htm>. Tanggal 25 Agustus 2007.
- Kompas. (2005) "PD Pasar Merencanakan Peremajaan 22 Pasar Tradisional". 4 Februari. Diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/04/ekonomi/1541747.htm>. Tanggal 25 Agustus 2007
- Munoz, L. (2001) The Traditional Market and the Sustainability Market: Is the Perfect Market Sustainable. *International Journal of Economic Development*. 3(4): 4.
- Nas, P.J.M. (1984) *Kota di Dunia Ketiga. Pengantar Sosiologi Kota Terdiri dari Tiga Bagian*. Jakarta: Bhaktara Karya Aksara.
- Natawidjaja, R.R. (2005) *Modern Market Growth and Changing Map of Retail Food Sector in Indonesia*. Bandung: Capas, Universitas Padjadjaran.
- Pemkot Surabaya (2004). Pasar Tambah Rejo dilengkapi Mal dan Trade Center. Diakses dari <http://www.surabaya.go.id/berita.php?kode=48>. Tanggal 25 Juli 2007.
- Pfeffermann, Guy. (2000) *Path Out of Poverty. The Role of Private Enterprise in Developing Countries*. Washington D.C.: International Finance Cooperation.
- Soekadri K. & Heru. (1996) Partisipasi Pelabuan Niaga Hujunggaluh dalam Lintasan Jalan Sutera (Suatu Kajian Awal). Pidato Pengukuhan. Surabaya: IKIP Surabaya.
- Surbakti, R. (1996) Perebutan Ruang di Perkotaan dan Pembenaannya. *Prisma*. Th XXV (9): 19-36.
- Suyanto, B. (1996) Pembangunan Kota dan Sengketa Tanah: Kasus Kotamadya Surabaya. *Prisma*. Th. XXV (9): 37-50.
- Tempo Interaktif, 27 Agustus 2002, "Pasar Tambahrejo habis dilalap api. Diakses dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2002/08/27/brk,20020827-17,id.html>. Tanggal 25 Agustus 2007.
- Weber, M. (1977) Apakah yang disebut Kota? Diterjemahkan oleh Darsiti Soeratman dan Amin Soendoro. Dalam: S. Kartodirdjo (ed). *Masyarakat Kuno dan Kelompok-kelompok Sosial*. Jakarta: Bhaktara Karya Aksara.
- Webster, Roger G. (2004). Wet markets-a continuing source of severe acute respiratory syndrome and influenza? *The Lancet*. London: Jan 17, 2004. Vol.363, Iss. 9404; pg. 234
- Wiradi, G. (1985) Ketenagakerjaan dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa. Dalam Peter Hagul. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.